

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dalam hal ini adalah prinsip hukum islam yang tertuang dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi kewenangan lembaga dalam mengeluarkan segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Aturan dan segala sistem lembaga keuangan yang berkaitan dengan aspek keuangan serta mekanismenya kini menjadi salah satu hal penting dalam proses memperlancar berjalannya perkembangan lembaga keuangan syariah ini.<sup>1</sup>

Perkembangan bank-bank Islam di Indonesia semakin kompleks, sehingga menuntut bank syariah di Indonesia untuk semakin inovatif dalam mengeluarkan produk-produk bank syariah. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi islam merupakan awal yang baik untuk bergerakinya pemikiran dan praktek ekonomi islam di Indonesia. Keunggulan lainnya dari produk bank syariah adalah dalam menjalankan kegiatan nya berprinsip pada syariah islam yaitu dengan tidak menggunakan bunga di dalamnya.<sup>2</sup> Hal itu tentu menjadi salah satu faktor keyakinan masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah.

---

<sup>1</sup> M. Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 167.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), hlm.1

Namun tak jarang juga lembaga-lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai Lembaga Keuangan Syariah, pada kenyataannya tidak semua menjalankan usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam. Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>3</sup> Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Dalam kegiatannya Bank Syariah Mandiri menawarkan beberapa produk dalam kegiatan pembiayaannya yaitu: produk penghimpunan dana (*financing*), produk penyaluran dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).<sup>4</sup> Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri (BSM) berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (exBDN) yang kemudian `dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.<sup>5</sup> Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 25 Rajab 1920 H atau tanggal 1 November 1999.

Salah satu produk pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan BSM Implan PNS. BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai karyawan tetap perusahaan dengan

---

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), hlm. 35.

<sup>4</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.97.

<sup>5</sup>Antonio, M.Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani, 2001).

penghasilan tetap yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) melalui rekomendasi instansi Pemerintah. Pembiayaan BSM Implan ini bertujuan untuk pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang dan jasa yang halal. Berdasarkan data yang diperoleh akad yang digunakan dalam pembiayaan BSM Implan PNS untuk pembiayaan manfaat atas jasa digunakan akad *ijarah*.

Pada pembiayaan BSM Implan PNS untuk pembiayaan manfaat, Bank Syariah Mandiri KC Garut menggunakan akad *ijarah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan jasa sekolah atau pendidikan, jasa kesehatan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Adapun yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang<sup>6</sup>. Ada dua jenis *Ijarah* dalam Islam yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti<sup>7</sup>. Dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan suatu aset/jasa kepada nasabahnya yang sebelumnya telah disewa oleh bank untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.<sup>8</sup> Itu berarti dalam pelaksanaan akad *ijarah* ini harus ada kejelasan dari unsur-unsur *ijarah* itu sendiri seperti *suplayer*, objek *ijarah*, dan pengguna jasa.<sup>9</sup>

Selain itu, di dalam Fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan menggunakan akad *ijarah* dijelaskan bahwasanya kewajiban lembaga keuangan syariah adalah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah. Kemudian penggunaan

---

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Daarul AIKitab, 1987), hlm. 183.

<sup>7</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm.70.

<sup>9</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2009), hlm.117-119.

akad *ijarah* di dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari *supplier* kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli aset tetap dari *supplier* yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap dioperasikan maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah<sup>10</sup>. Adapun objek akad *ijarah* adalah manfaat dari barang yang disewakan kembali oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat atau kegunaannya bisa diambil oleh nasabah, ataupun jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikan dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga itu sendiri<sup>11</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh pelaksanaan pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri KC Garut dengan menggunakan akad *ijarah*, pihak bank hanya bertindak sebagai penyedia dana, itu artinya bank hanya menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, yang pada prosesnya pembiayaan Implan PNS ini dimulai dengan adanya permohonan kerjasama dari instansi terkait, lalu setelah disetujui dan telah dilakukan beberapa persyaratan lainnya, pihak instansi mengumpulkan pegawai PNS yang akan mengajukan pembiayaan kepada bank dan setelah dokumen persyaratan di verifikasi oleh bank, pihak bank kemudian mencairkan pembiayaan ke rekening pegawai instansi sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhannya seperti biaya sekolah dan biaya kesehatan untuk kemudian dibayarkan kepada instansi terkait seperti sekolah atau rumah sakit.

---

<sup>10</sup>Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011)

<sup>11</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* , edisi kelima (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

Berdasarkan praktik *ijarah* yang diterapkan pada pembiayaan Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut, pihak bank hanya berperan sebagai penyedia dana dan tidak menyediakan jasa yang dibutuhkan dalam pembiayaan BSM Implan PNS untuk jasa sekolah, jasa kesehatan dan lain-lain. Bank hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk dibayarkan kepada pihak terkait (penyedia jasa), itu artinya di dalam proses tersebut telah terjadi perwalian dari pihak bank kepada nasabah, sedangkan pada pelaksanaannya berdasarkan data yang diperoleh tidak ada penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan Implan PNS di Kantor Cabang Garut ini serta tidak terdapat adanya bukti pelimpahan kuasa berupa surat kuasa atau semacamnya untuk mewakili lembaga keuangan syariah membayarkan dana kepada instansi yang berkaitan.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam penelitian berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH DALAM PEMBIAYAAN BSM IMPLAN PNS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG GARUT**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa dalam praktek pembiayaan BSM Implan PNS menggunakan akad *ijarah* ini bank hanya bertindak sebagai lembaga penyedia dana, dan jasa yang diperoleh nasabah berasal dari pihak ketiga. Di dalam pelaksanaannya tersebut tidak terdapat adanya pelimpahan kuasa dari pihak bank kepada pihak penyedia jasa sebagai pihak ketiga. Sedangkan di dalam Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/VII/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* pada

point ketiga kewajiban lembaga keuangan syariah adalah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah.

Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut menurut Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat maupun pihak perbankan syariah mengenai pelaksanaan pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak

## E. Kerangka Penelitian

### 1. Studi Pendahuluan

No	Nama	Judul Skripsi	Pembahasan
1	Siska Rismarawati (2018)	Pelaksanaan Pembiayaan BSM Implan PNS Tanpa Agunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut	Pada penelitian ini dibahas mengenai tidak adanya agunan di dalam Pembiayaan BSM Implan PNS di Kantor Cabang Garut.
2	Iis Nurhasanah (2013)	Akad <i>Murabahah Wa Al-Wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung	Pada penelitian ini dibahas mengenai pembayaran margin dan ujrah yang dikenakan kepada nasabah untuk dibayarkan kepada pihak bank dan instansi perusahaan yang tidak sesuai dengan asas-asas keadilan.



3	Latu Perisa (2015)	Tingkat Kepuasan Anggota Koperasi Mitra Kerja Bank Syariah Mandiri terhadap Program BSM Implan	Pada penelitian ini dibahas mengenai seberapa besar tingkat kepuasan Anggota Koperasi Mitra Kerja Bank Syariah Mandiri terhadap program BSM Implan.
4	Najah Fitriatun (2018)	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya	Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan Implan di BSM Cabang Palangkaraya
5	Harawita (2018)	Konsep dan Aplikasi Pembiayaan BSM Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng	Penelitian ini membahas bagaimana pembiayaan BSM Implan di BSM KCP Ulee Kareng secara konsep dan pengaplikasiannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pembiayaan BSM Implan PNS tersebut. Kedudukan penelitian dengan penelitian-penelitian yang lain adalah penelitian ini membahas mengenai penggunaan akad *ijarah* yang digunakan untuk pembiayaan pemanfaatan jasa sekolah dan kesehatan dalam produk BSM Implan PNS yang bertitik tolak pada Fatwa DSN No.09



DSN/MUI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* pada point kewajiban lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa kewajiban Lembaga Keuangan Syariah adalah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah, sedangkan di dalam prakteknya Bank hanya bertindak sebagai penyedia dana, dan jasa disediakan oleh pihak ketiga yang didalam pelaksanaannya ketika bank tidak menyediakan jasa secara langsung maka di dalam proses pembiayaan tersebut terjadi pelimpahan kuasa kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan nya bank tidak menggunakan akad *wakalah* atau tidak ada bukti pelimpahan kuasa kepada pihak ketiga. Sehingga perlu ditinjau berdasarkan perpspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian terdahulu milik Rismarawati, S (2018) permasalahan yang dibahas adalah tidak adanya Agunan di dalam pembiayaan BSM Implan PNS sedangkan di dalam Fatwa diperbolehkan adanya Agunan sebagai jaminan. Kemudian penelitian selanjutnya milik Nurhasanah,I (2013) membahas mengenai pembayaran *margin* dan *ujrah* pada pembiayaan BSM Implan PNS menggunakan akad Murabahah yang dibebankan kepada nasabah dianggap tidak sesuai asas keadilan. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pembiayaan Implan PNS di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut menggunakan akad *ijarah* dengan meninjau pelaksanaan pembiayaannya berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah akad terbagi menjadi dua diantaranya adalah akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Yang termasuk ke dalam akad *tijarah*

adalah *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*. Salah satu akad yang digunakan pada produk BSM Syariah Mandiri Garut adalah akad *ijarah*.

Bank Syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dalam hal ini adalah prinsip hukum islam yang tertuang dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi kewenangan lembaga dalam mengeluarkan segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Aturan dan segala sistem lembaga keuangan yang berkaitan dengan aspek keuangan serta mekanismenya kini menjadi salah satu hal penting dalam proses memperlancar berjalannya perkembangan lembaga keuangan syariah ini.<sup>12</sup>

Perkembangan bank-bank Islam di Indonesia semakin kompleks, sehingga menuntut bank syariah di Indonesia untuk semakin inovatif dalam mengeluarkan produk-produk bank syariah. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaannya dalam perkembangan ekonomi islam merupakan awal yang baik untuk bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi islam di Indonesia. Keunggulan lainnya dari produk bank syariah adalah dalam menjalankan kegiatannya berprinsip pada syariah islam yaitu dengan tidak menggunakan bunga didalamnya.<sup>13</sup> Hal itu tentu menjadi salah satu faktor keyakinan masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah. Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut adalah BSM Implan PNS.

<sup>12</sup> M, Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

<sup>13</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.1

BSM Implan PNS sendiri adalah pembiayaan dalam rupiah yang diberikan oleh Bank kepada PNS yang pengajuannya dilakukan secara *massal* (kelompok) melalui rekomendasi instansi Pemerintah, pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah* dalam pembiayaan Implan PNS sendiri adalah jasa yang tidak bertentangan secara syariah seperti pembiayaan jasa sekolah dan jasa kesehatan. Pembiayaan ini dibolehkan sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/ DSN-MUI/VII.2004, tentang pembiayaan *multijasa*, yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan *multijasa*, yaitu pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.<sup>14</sup>

Pembiayaan BSM Implan PNS dalam bentuk jasa ini termasuk ke dalam pembiayaan *multijasa* yang di dalam pelaksanaannya boleh menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Apabila menggunakan akad *ijarah* maka pelaksanaannya mengikuti fatwa *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan salah satu akad yang telah di syariatkan dalam Islam, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. dengan landasan hukum bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' serta landasan hukum yang tercantum dalam undang-undang atau fatwa. Adapun landasan hukum Al-Quran mengenai *ijarah* adalah pada Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا مَلُونَنَّا بَصِيرٌ

---

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang *Pembiayaan Multijasa*.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Q.S At-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا فَاُتُوا بِمَالِكٍ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....”<sup>15</sup>

Hadits riwayat Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ۚ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah-2434)<sup>16</sup>.

Riwayat Abd ar- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al- Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

<sup>15</sup>El Quthubi, U. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Cetakan Keempat. (Bandung: Al-Qur'an Corodoba, 2016), hlm. 559.

<sup>16</sup> Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*. (Beirut : Dar Al-Fikr, 2003).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أُنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu’bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa’id berkata, “ jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya”. (H.R An-Nasa’i- 3797).<sup>17</sup>

Landasan *ijma*’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

Dalam perjanjian akad *ijarah* untuk pembiayaan jasa di lembaga keuangan syariah, pihak pemberi sewa (*mu”ajjir*) adalah lembaga keuangan syariah, anggota sebagai penyewa (*musta’jir*), dan *fee(ujrah)* sebagai biaya tambahan atau upah yang diperoleh bank. Namun yang dimaksud dengan jasa dalam *ijarah* ini adalah jasa yang disediakan atau dikerjakan oleh bank sebagai lembaga keuangan atau jasa yang dimaksud adalah jasa bank syariah yaitu produk jasa bank syariah<sup>18</sup>. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan *ijarah* bahwasanya kewajiban lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan *ijarah* ini adalah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dalam pengertian lain jasa perbankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai

<sup>17</sup> Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*. (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif.tt)

<sup>18</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet ke-1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.369.

pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan<sup>19</sup>. Selain itu, terdapat pula istilah pembiayaan dengan prinsip jasa, pembiayaan ini disebut dengan prinsip jasa karena pada prinsip dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru* yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan, berbagai pengembangan dari akad *tabarru'i* meliputi *wakalah*, *kafalah*, *qord*, *hawalah*, *rahn*, *ijarah*.<sup>20</sup>

Pelaksanaan yang terjadi di Bank Syariah Kantor Cabang Garut dalam pembiayaan BSM Implan PNS menggunakan akad *ijarah* ini bank tidak menyediakan jasa yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya berperan sebagai penyedia dana. Karena berdasarkan data yang diperoleh jasa yang dalam pembiayaan Implan PNS ini adalah jasa-jasa yang berhubungan dengan pihak ketiga dan tidak dapat disediakan secara langsung oleh bank seperti jasa pendidikan dan jasa kesehatan, sehingga disini bank menyerahkan dana sepenuhnya secara langsung kepada nasabah untuk dibayarkan kepada pihak terkait sesuai kebutuhannya yang dalam hal ini secara langsung telah terjadi perwalian oleh lembaga keuangan kepada nasabah, namun didalam praktiknya dalam pembiayaan BSM Implan PNS tidak digunakan akad *wakalah* ataupun tidak ada bukti pelimpahan kuasa berupa surat kuasa atau semacamnya untuk mewakili Lembaga Keuangan Syariah dalam membayarkan dana kepada instansi yang berkaitan. Sementara jelas diatur dalam fatwa bahwasanya bank berkewajiban menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah apabila hendak diwakilkan kepada nasabah.

---

<sup>19</sup> Adiwarmar A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi kelima. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 171.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak mungkin ditujukan untuk mencari keuntungan. Tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Biasanya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul, akad pelengkap ini adalah *tabarru'*. Seperti *Hiwalah* (akad utang piutang), *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), *Kafalah* (Bank Garansi).

Berdasarkan Syariah Islam yang menjunjung asas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat dilihat dari kaidah ushul fiqh yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Adapun akad-akad yang terlarang yaitu akad yang melanggar prinsip عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (Kerelaan), akad yang melanggar prinsip لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, dan akad yang tidak ada rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, seorang muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad sepanjang tidak mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan Al-Qur'an atau Sunnah.

Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak<sup>21</sup>. Akad juga disebut sebagai suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 50



akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>22</sup> Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b. *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-aqd*, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ini mencakup:

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalampenulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di BSM Kantong Cabang Garut, yang beralamat lengkap di Jalan Ciledug No.148-149, Kel.Kota Kulon, Kec.Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat 44112. (0262) 243689, 243692.

---

<sup>22</sup>Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*.(Yogyakarta: UII Pers, 1982), hlm.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian menguraikan data yang diperoleh dari lembaga keuangan (Bank Syariah) itu sendiri, dengan alasan metode ini dapat memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh dan terintegrasi karena meneliti objek yang alamiah dimana pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian bersifat generalisasi.<sup>23</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>24</sup>. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif ini akan dapat membantu peneliti mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan BSM Implan PNS menggunakan akad *ijarah* di BSM Kantor Cabang Garut.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang waktu pelaksanaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BSM Implan PNS di BSM Kantor Cabang Garut, yaitu:

- a. Pelaksanaan akad *ijarah* dalam produk pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Garut.

---

<sup>23</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm.1

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

- b. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *ijarah* pada pembiayaan BSM Implan PNS di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Garut dengan Tinjauan Hukum Islam mengenai teori *Ijarah*.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Adapun sumber primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BSM, Bapak Firman Firdaus sebagai Manager Marketing di BSM KC Garut.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, brosur, internet yang dijadikan literatur dalam penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan Implan PNS dengan menggunakan akad *ijarah*. Dan sumber data lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tanya jawab dilakukan dengan Bapak Firman Firdaus selaku Manajer bagian Marketing di BSM Kantor pada tanggal 10 Desember 2018 seputar pelaksanaan pembiayaan Implan PNS dengan akad *ijarah* di BSM Kantor Cabang Garut.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan masalah penelitian.

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis untuk dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data; langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan pembiayaan BSM Implan PNS dengan menggunakan akad *Ijarah* di BSM Kantor Cabang Garut.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.